

**PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TANA TORAJA**



Diajukan Oleh :

**NATANIEL BIANG MATASIK
45 05 013 012**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2009**

HALAMAN PENERIMAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2009

Skripsi Atas Nama : Nataniel Biang Matasik

Stambuk : 45 05 013 012

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum

: Prof. DR. H. Abu Hamid
(Rektor Universitas "45")

Ketua

: Haeruddin Saleh, SE, M.Si
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

Sekretaris

: Irwan L. Gaffar, SE, M.Si

Anggota Penguji

1. Drs. Syamsuddin, M.Si, Ak

2. Drs. Mardjuni, M.Si

3. Cahyono, SE, M.Si

4. Faridah, SE, M.Si, Ak

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TANA TORAJA

NAMA MAHASISWA : NATANIEL BIANG MATASIK

NOMOR STAMBUK : 45 05 013 012

JURUSAN : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

(Drs. SYAMSUDDIN, M.Si. Ak.)

PEMBIMBING II

(FARIDAH, SE., M.Si., Ak.)

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN:
Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas "45" Makassar

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"



HAERUDDIN SALEH, SE., M.Si.

KETUA JURUSAN AKUNTANSI

FARIDAH, SE., M.Si., Ak.

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan syukur, penulis haturkan kehadiran Bapa Surgawi karena atas anugrah dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Tulisan ini merupakan Tugas Akhir sebagai persyaratan bagi penulis selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas "45" Makassar sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi dan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Untuk maksud tersebut, maka penulis mengambil sebuah Skripsi dengan judul :

**“PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TANA TORAJA”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini tidak sedikit tantangan dan rintangan bahkan pergumulan yang harus penulis hadapi, tetapi dengan kerja keras dan semangat yang disertai dengan doa bahkan motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya semuanya teratasi dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid** selaku Rektor Universitas "45" Makassar
2. **Bapak Drs. Syamsudin, M.Si., Ak.** selaku pembimbing I dan **Ibu Faridah, SE., M.Si., Ak.** selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan pandangan dalam penyusunan skripsi ini.

3. **Bapak Haeruddin Saleh, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan **Ibu Faridah, SE, M.Si, Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.
4. Seluruh Staf Dosen pengasuh serta Staf Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar yang telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu sampai penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Direktur** Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja serta seluruh staf karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam pengambilan data sesuai yang dibutuhkan penulis.
6. Teristimewa rasa hormat dan kasih sayang penulis haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda M.G Matasik dan Ibunda M.B Tanna yang telah membesarkan, merawat, mendidik dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Memberkati.
7. Kepada Kakakku Zeth, Aris, Ria, Harun, Rina, Riny, Trifena dan ponakan-ponakanku yang tercinta yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, doa, kasih sayang yang tak terhingga baik moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan.
8. Teman-temanku angkatan 05 Akuntansi, Manajemen dan Study Pembangunan, thanks for all atas semua bantuannya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kerangka Teori	10
2.1.1 Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban	13
2.1.2 Syarat-Syarat Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban	16
2.1.3 Pengertian Fungsi dan Jenis Anggaran	17
2.1.4 Pengertian dan Klasifikasi Biaya	21
2.1.5 Klasifikasi Biaya Sesuai dengan Dapat Dikendalikan Tidaknya Oleh Manajer Dalam Hubungannya Pertanggungjawaban	27
2.1.6 Selisih Biaya	29
2.2 Kerangka Pikir	30
2.3 Hipotesis	31

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	3.1 Metode Penelitian	31
	3.2 Metode Pengumpulan Data	31
	3.3 Jenis dan Sumber Data	31
	3.4 Metode Analisis	32
	3.5 Definisi Operasional	32
	3.6 Sistematika Pembahasan	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
	4.1 Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja	34
	4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	35
	4.3 Struktur Organisasi dan Sistem Anggaran PDAM Tana Toraja	45
	4.5 Pengelompokan Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali ...	48
	4.6 Penggunaan Anggaran PDAM Tana Toraja	52
	4.7 Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran PDAM Tana Toraja	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
	5.1 Kesimpulan	60
	5.2 Saran-Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penggolongan Biaya Terkendali Dan Biaya Tidak Terkendali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja Periode 2008	48
Tabel 2. Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja Periode 2008.....	51
Tabel 3. Realisasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tana Toraja Periode 2008.....	54
Tabel 4. Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Tana Toraja Periode 2008.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Akuntansi diartikan sebagai suatu aktivitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif atau berupa angka-angka berkaitan dengan masalah keuangan (financial) kepada pihak yang berkepentingan. Jasa yang lain yang diberikan akuntansi adalah menjaga, mengatur dan mengamankan kekayaan, baik dalam perusahaan maupun dalam instansi pemerintah.

Informasi yang di hasilkan akuntansi diperoleh melalui suatu proses akuntansi itu sendiri yang dimulai dari pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran atas semua transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan masalah keuangan. informasi akuntansi mencerminkan kejadian masa lalu yang dialami, kondisi saat ini dan kemungkinan yang akan dihadapi pada masa akan datang. Untuk itu, akuntansi sangat membantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan.

Fungsi akuntansi pada instansi pemerintah adalah untuk menjaga, mengatur dan mengamankan kekayaan atau aset yang dimiliki instansi. Setiap penggunaan dana di otorisasi oleh pihak yang berwenang, dicatat dalam pembukuan yang dilengkapi bukti tertulis. Selain itu, penggunaan dana diketahui lebih dari satu orang dan harus dipisahkan antara fungsi yang menyimpan dan fungsi yang mengeluarkan dana dengan tujuan untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan atau penyalahgunaan dana.

Untuk menggambarkan berbagai sisi akuntansi, Belkaoui (1986) dan penulis lain disebutkan beberapa image yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut :

- 1) Akuntansi sebagai ideologi
- 2) Akuntansi sebagai suatu bahasa
- 3) Akuntansi sebagai suatu catatan historis
- 4) Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini
- 5) Akuntansi sebagai suatu sistem informasi
- 6) Akuntansi sebagai suatu komoditi
- 7) Akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban
- 8) Akuntansi sebagai teknologi

1. Akuntansi sebagai suatu ideologi

Tidak banyak yang membahas bahwa akuntansi dianggap sebagai suatu ideologi. Pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi menganggap bahwa akuntansi ini alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial , ekonomi, dan politik kapitalis. Malah Karl Marx menganggap bahwa akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memistikkan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi yang menggambarkan hubungan antara penguasaan alat produksi dan produksi itu sendiri. Kalau kapasitas menganggap kalau motor produksi itu adalah pekerjaan dan pekerja merupakan pemilik faktor produksi dan menikmati

hasil produksinya. Dalam kaitannya dengan ini akuntansi juga dianggap sebagai mitos, simbol, dan ritus yang berperan menciptakan aturan simbolis tempat masyarakat berinteraksi. Akuntansi konvensional ilmu yang didesain dan dikembangkan dalam masyarakat Barat yang dilandasi oleh ideologi kapitalisme. Bangun teori akuntansi diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan kepentingan pemilik modal. Dalam Trueblood Committee Report dan APB Statement No. 4 yang merupakan landasan teoritis dari akuntansi keuangan konvensional kapital jelas bahwa laporan keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada pemilik modal tentang investasi dan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga ekonomi, sasarannya adalah agar kekayaannya, resources yang dimilikinya terus bertambah, berkembang dengan return yang tinggi. Sasaran ini sejalan dengan ideologi kapitalisme yang ingin memupuk kekayaan dalam dirinya dan menjadikan pihak lain sebagai *peripheral* dan tunduk kepada kepentingannya.

2. Akuntansi sebagai bahasa

Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat berbicara (berkomunikasi) sendiri tentang suatu perusahaan/organisasi yang dilaporkannya. Sebagai halnya bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri yang sama dengan bahasa.

Akuntansi memiliki hal-hal berikut ini :

a. Simbol atau sifat *lexical*

Akuntansi memiliki simbol-simbol, istilah, kata-kata yang kadang hanya dimengerti oleh mereka yang mengetahui atau menguasai akuntansi, seperti istilah neraca, laba rugi, perkiraan, debit-kredit, jurnal, buku kas besar dan lain-lain.

b. Tata aturan atau *grammatical Rucel*

Kalau bahasa memiliki tata bahasa, maka akuntansi juga memiliki aturan sehingga orang dapat memahami bahasa/komunikasi akuntansi. Seperti aturan tentang penempatan pos berdasarkan likuiditas, aturan pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, proses pemindahbukuan, aktual, dan lain-lain.

3. Akuntansi sebagai catatan historis

Akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan wahana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa lalu. Catatan ini merupakan gambaran bagaimana manajemen mengelola kekayaan pemilik. Transaksi yang lalu itu dicatat, dibukukan dan dilaporkan melalui laporan keuangan. Data dan laporan historis inilah yang dijadikan dasar untuk dianalisis dan dengan menggunakan transaksi tertentu dapat dijadikan alat prediksi keuangan untuk memahami kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dimasa yang akan datang.

4. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini

Bagi pendukung pendapat ini, akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan saat sekarang sehingga sistem akuntansi harus menggunakan harga saat ini atau *current value*.

5. Akuntansi sebagai sistem informasi

Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses menghubungkan data melalui channel komunikasi dengan para penerima informasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut *accounting cycle*, yang memproses bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan yang dapat dipergunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan.

6. Akuntansi sebagai komoditi

Komoditi adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi dalam bentuk informasi adalah merupakan produk dari suatu pabrik yang dalam konteks ini pabrik tersebut adalah sistem akuntansi. Output ini dibutuhkan masyarakat karena memberikan manfaat yang besar terutama bagi para pemakainya yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

7. Akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban

Akuntansi juga dapat dijadikan sebagai media untuk pertanggungjawaban pengelolaan suatu lembaga suatu perusahaan atau lembaga pada *principal* (majikan). Dengan adanya akuntansi, sumber-sumber kekayaan dapat ditelusuri, dapat diketahui arus masuk dan keluarnya, serta hasil yang diperoleh dari transaksi yang terjadi beserta posisi masing-masing kekayaan pada suatu tanggal tertentu dan hasil usahanya pada suatu periode. Gambaran ini semua tercakup dalam laporan keuangan yang berfungsi baik sebagai informasi maupun sebagai pertanggungjawaban. laporan ini seolah-olah bahwa 'inilah pertanggungjawaban manajer dalam mengelola asset yang dipercayakan kepadanya'.

8. Akuntansi sebagai Teknologi

Bambang Sudibyo (1987) pernah mengajukan argumen tentang posisi akuntansi sebagai teknologi dan bukan sebagai *science* atau *art*. Menurut beliau akuntansi adalah bagian dari praktik sedangkan jika akuntansi dianggap sebagai teori, maka untuk bisa dipakai memengaruhi harus terlebih dahulu diolah jadi teknologi. Teknologilah yang secara langsung akan dapat mengubah sosial. Dengan demikian, teknologilah yang bisa menjembatani antara teori dan praktik.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan proses kegiatan penyusunan laporan atas penggunaan anggaran selama satu periode yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan disajikan secara rinci, baik aktivitas yang dilaksanakan maupun

besarnya anggaran yang digunakan. Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat berlangsung dengan baik, maka perlu ditetapkan suatu sistem dan prosedur yang didalamnya berisi tentang bagian-bagian yang terlibat mekanisme yang digunakan serta mekanisme kerjanya.

Akuntansi pertanggungjawaban dapat disajikan sebagai alat pengendalian biaya, karena apa yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya mencakup beberapa aktifitas dan besarnya biaya yang digunakan, sehingga dengan mudah dapat diketahui layak tidaknya laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan pada akhirnya akan memberikan informasi mengenai prestasi yang dicapai manajemen perusahaan.

Akuntansi pertanggungjawaban mainkan perannya pada empat bagian, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan investasi. pertanggungjawaban pada pusat biaya dimaksudkan untuk menilai perbandingan antara biaya yang distandarkan dengan biaya yang sesungguhnya. Pertanggungjawaban pada pusat pendapatan dimaksudkan untuk menilai apakah target pendapatan yang direncanakan dapat direalisasikan dengan tepat. Pertanggungjawaban pada pusat laba dimaksudkan untuk menilai apakah tingkat laba yang dicapai sudah memenuhi ketentuan yang distandarkan. Pertanggungjawaban pada pusat investasi dimaksudkan untuk menilai apakah besarnya investasi yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan dan dapat memberikan hasil yang besar pula. Perlakuan akuntansi pertanggungjawaban pada empat bagian, meliputi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba serta pusat investasi

pada prinsipnya bertujuan untuk menilai baik tidaknya pusat-pusat tersebut dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja sebagai perusahaan daerah yang menyediakan air bersih maka akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan adalah pertanggungjawaban pusat biaya (cost center) akuntansi pertanggungjawaban untuk menilai efektifitas antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang distandarkan. Permasalahan yang dihadapi PDAM Tana Toraja adalah adanya biaya yang tidak terukur (tidak terkendali), sehingga berakibat pada seringnya terjadinya selisih anggaran biaya yang menguntungkan dan tidak menguntungkan sebagai bukti bahwa pengendalian biaya belum berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengangkat judul **“penerapan akuntansi pertanggungjawaban biaya sebagai alat pengendalian biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja”**.

1.2. Masalah Pokok

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu **“Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban biaya sebagai alat pengendalian biaya sudah diterapkan pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tana Toraja.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Sebelum membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban terlebih dahulu disajikan pengertian akuntansi. Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menyajikan dan menafsirkan data keuangan dari perusahaan. Dimana aktivitas berhubungan dengan produksi, pertukaran barang dan jasa atau berhubungan dengan pengelolaan data akuntansi sebagai alat bantu manajemen dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan yang disajikan dalam laporan perusahaan bersangkutan.

Djawarto (1995 : 2) mendefenisikan "Akuntansi merupakan seni peringkasan, pelaporan dan penafsiran data keuangan dan operasian perusahaan, dinyatakan dalam bentuk uang untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian pada perusahaan".

Berdasarkan defenisikan diatas terlihat bahwa akuntansi terdiri dari beberapa tahap tindakan, yaitu :

- a. Pengumpulan data dan penganalisaan
- b. Pencatatan, pengelompokan, peringkasan dan pelaporan
- c. Penafsiran

Baridwan (1991 : 1) memberikan defenisi bahwa : Akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dengan memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Pengertian yang dikemukakan diatas memendangkan akuntansi sebagai kegiatan jasa yang didalamnya menyediakan data kuantitatif dan sekaligus dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Sehingga sorotan akuntansi ini tidak lain adalah administrasi angka-angka mengenai keuangan perusahaan itu sendiri.

Selanjutnya smith (1991 : 379) memberikan pengertian :Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi sebagai penyedia informasi kuantitatif”.

Menyimak beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah kegiatan administrasi mencatat, mengklasifikasikan dan menganalisa data yang akan disajikan dalam bentuk laporan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan serta sekaligus alat informasi dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal penting dalam proses pendalian manajemen yang bertanggung jawaban terhadap perencanaan dan realisasinya. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian kegiatan usahanya, manajemen perusahaan melalui suatu yang disebut pengendalian manajemen yang memerlukan suatu sistem yang disebut sistem akuntansi pertanggungjawaban (Responsibility accounting).

Mulyadi (1991 : 379) mendefenisikan sebagai berikut: Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan serta penghasilan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban terhadap penyimpanan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan.

Sementara Matz dan Usry (1997 : 256) memberikan pengertian bahwa : Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas penggolongan tanggungjawab manajemen (departemen-departemen) pada setiap tingkat dalam organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen individu yang mengelai klasifikasi pertanggungjawaban biaya-biaya dari kegiatan.

Selanjutnya Horngren (1996 : 307) mengemukakan bahwa ; Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi dengan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat dengan menerapkan penghasilan dan biaya tertentu sebagai pusat yang memiliki tanggungjawab yang bersangkutan.

Akuntansi pertanggungjawaban bahwa seorang dalam suatu organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan biaya atau pendapatan adalah orang yang bertanggungjawab terhadap suatu pusat pertanggungjawaban yang harus ditegaskan, diukur dan dilaporkan ke manajemen puncak. Dalam kaitan ini, suatu organisasi merupakan kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang tergambar dalam bagan organisasi. keseluruhan pusat pertanggungjawaban yang membentuk jenjang hirarki dalam organisasi dianggap sebagai pusat

pertanggungjawaban, baik sebagai pertanggungjawaban pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah bagian dari akuntansi manajemen yang aktifitasnya masukan (input) dan keluaran (output). Kegiatan tersebut diperluas dengan mengumpulkan dan melaporkan, baik rencana kegiatan pusat pertanggungjawaban berupa tenaga kerja, maupun realisasi kegiatan berupa barang dan jasa. Inti dari akuntansi pertanggungjawaban adalah setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas segala faktor yang berada dibawah dan berhubungan dengan tindakan yang akan diambil dan dipertimbangkan oleh manajemen.

Akuntansi pertanggungjawaban dapat diharapkan apabila suatu perusahaan sudah membagi-bagi bidang pertanggungjawaban yang diberikan kewenangan untuk mengurus anggaran biaya dan penghasilannya sendiri-sendiri dengan memperhatikan tujuan perusahaan sebagai keseluruhan. Untuk itu, sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun untuk mengumpulkan informasi biaya dan penghasilan untuk dilaporkan kepada bagian akuntansi atau kelompok orang yang tetap bertanggungjawab terhadap penghasilan dan penggunaan biaya.

2.2. Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar bagi penilaian prestasi seorang manajer. Untuk memiliki prestasi ekonomi pusat pertanggungjawaban digunakan informasi pertanggungjawaban yang menelusuri biaya pendapatan dan investasi untuk unit organisasi individual secara umum terdapat 4 (empat) jenis pusat

pertanggungjawaban yang penggolongannya didasarkan atas wewenang, tanggungjawab dan pengukuran prestasinya dan berdasarkan sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran dalam bentuk pendapatan atau secara bersama-sama.

Mulyadi (1991 : 348) menyatakan bahwa "pusat pertanggungjawaban dalam organisasi di ukur berdasarkan masukan dan keluaran yang merupakan selisih diantara keduanya berdasarkan masukan".

Pusat-pusat pertanggungjawaban dapat digolongkan menjadi empat jenis yaitu

a. Pusat biaya (*exspence/cost center*)

Pusat biaya yang biasanya disebut pusat pengeluaran adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya diukur atas dasar biaya pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pengukuran biaya tersebut dilakukan dengan dasar nilai uang yang digolongkan kedalam dua bagian yaitu ;

- *Enginereed Expencc center (pusat biaya terkendali)*

Pusat biaya terkendali adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarganya. Contoh, departemen produksi. Pusat biaya terkendali dapat dihitung dan dianalisis mengenai perbandingan antara anggaran biaya yang sesungguhnya dengan anggaran biaya yang distandarkan.

- Discretionary/expense center (*pusat biaya tidak terkendali*)

Pusat biaya yang tidak terkendali adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarganya. Contoh, Departemen personalia.

- b. Pusat pendapatan (*Revenue center*)

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya di nilai berdasarkan pendapatan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Dimana ukuran prestasinya yang paling penting adalah pendapatan yang dihasilkan. Pada pusat pendapatan, keluarganya diukur dengan nilai uang tetapi terdapat hubungan yang erat dan nyata antara masukan atau biaya dengan keluarannya.

- c. Pusat Laba (*profit center*)

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba, karena baik masukan maupun keluaran yang ada dalam pusat pertanggungjawaban tersebut dinilai dengan jumlah uang untuk menghitung laba yang digunakan untuk mengukur prestasi dan manajer.

- d. Pusat investasi (*investment center*)

Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya di nilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada perusahaan pertanggungjawaban. pengukuran prestasi

manajer dari pusat pertanggungjawaban tidak sama, karena terdapat pemisahan tipe pusat-pusat pertanggungjawaban dimana pengukuran prestasinya dapat didasarkan pada masukan, keluaran serta selisih antara masukan dan keluaran. seorang manajer pada pusat laba tidak hanya bertanggungjawab atas laba rugi yang terjadi. tetapi juga mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas investasi yang dilaksanakan mencakup laba yang dihasilkan dan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba.

2.3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban.

Timbulnya akuntansi pertanggungjawaban disebabkan adanya pembagian tugas bagi setiap bagian yang terdapat dalam perusahaan. Bagian-bagian tersebut biasa disebut dengan pusat pertanggungjawaban yang mempertanggungjawabkan semua apa yang direalisasikan atau biaya yang digunakan selama kegiatan perusahaan berlangsung dalam suatu periode yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang ditetapkan perusahaan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu :

- a. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggungjawab tiap lingkungan manajemen.
- b. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen.
- c. Penggolongan biaya yang disusun untuk dapat dikendalikan atau tidaknya biaya oleh manajemen tertentu dalam organisasi.
- d. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi.

e. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab (responsibility reporting)

Orang-orang dalam perusahaan merupakan kumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka perlu diadakan pengaturan secara jelas mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan yang merupakan tanggungjawabnya. Dengan adanya pembagian tugas akan memudahkan pimpinan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan dengan rencana agar sasaran tercapai secara efektif dan efisien.

Mas'ud (1996 : 33) mengemukakan bahwa "struktur organisasi adalah bagan yang merupakan bagian-bagian yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan struktur organisasi dikatakan sebagai pusat pertanggungjawaban".

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda beda dalam organisasi dan mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran satuan kerja).

2.4. pengertian fungsi dan jenis anggaran

2.4.1. pengertian anggaran

Anggaran atau dikenal dengan budget berkaitan dengan informasi besarnya keuangan atau sumber ekonomis yang akan disediakan atau disediakan atau yang

akan dialokasikan pada suatu aktifitas kerja agar dapat terlaksana dan berhasil sesuai apa yang dikehendaki.

Anggaran bagi instansi pemerintah merupakan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan yang harus dipegang oleh pemerintah dalam memaksakan aktifitas kegiatannya agar penggunaan dana secara tepat dilakukan dengan sasaran penggunaannya yang tepat pula. Hal ini seperti dikatakan subagyo (1992 : 92) bahwa "anggaran merupakan kompas yang menunjukkan arah yang harus dianut oleh pemerintah didalam menjalankan administrasi keuangan dan sekaligus merupakan roda yang dapat mengemudikan arah itu".

Pengertian diatas mengartikan anggaran sebagai alat perencanaan dan pedoman dalam melaksanakan aktivitas administrasi keuangan dan sekaligus pendukung pelaksanaan kerja yang dilakukan pemerintah. Artinya, pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan harus mengacu pada anggaran yang sudah ditetapkan dan sasaran yang hendak dicapai, berarti anggaran sudah menunjukkan besarnya biaya untuk alokasi suatu pekerjaan dan bentuk atau hasil yang akan dicapai. Anggaran tidak terlepas dari kebijakan manajemen suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta, karena untuk mengacu pada apa yang telah menjadi ketetapan, tidak akan terwujud apabila tidak didasari dengan suatu keputusan dari pihak tertinggi dalam sebuah organisasi yang mutlak dilaksanakan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan, baik besarnya anggaran maupun pengalokasiannya benar-benar disesuaikan.

Kemudian oleh Husein (1992 : 6) dikatakan bahwa “anggaran adalah suatu bentuk statemen dari rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau blue print dalam periode itu”.

Pengertian ini mengandung makna, bahwa anggaran merupakan suatu keputusan manajemen yang merupakan komitmen kebijaksanaan untuk dijadikan petunjuk dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Anggaran bagi negara adalah estimasi jumlah pendapatan dan pengeluaran yang akan diterima untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan dan pembelanjaan dan proyek-proyek pembangunan yang telah dibuat guna kepentingan masyarakat, sehingga anggaran member suatu pegangan ekonomis yang dimiliki negara dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan agar terwujud sesuai yang tertuang dalam APBN dan APBD.

Selanjutnya Marsono (1997 : 19) mendefenisikan “anggaran adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun anggaran mendatang dan harus di hubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama”.

Anggaran menurut pengertian ini adalah rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran Negara terhadap beberapa rencana sumber-sumber penerimaan dan alokasi pembangunan yang telah ditetapkan dengan maksud pelaksanaan pembangunan dapat dicapai sesuai anggaran yang ada.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah merupakan petunjuk atau pedoman yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan administrasi keuangan, baik sumber penerimaan maupun alokasi pembiayaan

sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Sehingga anggaran adalah alat yang dapat berfungsi sebagai perencanaan (penerimaan dan pengeluaran), pengawasan dan koordinasi serta evaluasi yang telah dihasilkan maupun yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya (akan datang).

2.4.2. Fungsi Anggaran

Beberapa fungsi anggaran menurut para ahli diantaranya menurut Marsono (1997 : 25), yaitu:

1. Perencanaan

Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan disebabkan anggaran yang telah disusun merupakan rencana kerja yang harus dijadikan acuan kerja, sehingga dapat menjadi perbandingan antara apa yang di realisasikan dengan yang direncanakan.

2. Alat pengendalian

Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian, karena ketika pelaksanaan anggaran berlangsung dilakukan pengawasan agar benar-benar sesuai yang di harapkan

2.4.3. Jenis- Jenis Anggaran

Menurut Munandar (2001 : 49), bahwa jenis-jenis anggaran yang terdapat dalam perusahaan, meliputi:

- 1) Anggaran penjualan
- 2) Anggaran administrasi
- 3) Anggaran piutang
- 4) Anggaran persediaan

5) Anggaran kas

Anggaran penjualan adalah anggaran yang direncanakan secara terinci tentang penjualan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang yang di dalamnya berisi tentang jenis barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual serta waktu dan tempat penjualan.

Anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang direncanakan tentang biaya-biaya yang terjadi dilingkungan kantor administrasi perusahaan secara keseluruhan.

Anggaran piutang adalah anggaran yang direncanakan tentang persediaan barang selama periode yang akan datang yang didalamnya meliputi barang yang tersedia, jumlah barang yang tersedia, jumlah barang yang tersedia serta nilai barang yang tersedia.

Anggaran kas adalah anggaran yang direncanakan secara rinci tentang jumlah kas serta perubahan dari waktu ke waktu selama periode akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas baik perubahan berupa pengeluaran kas.

2.5. Pengertian dan Klasifikasi Biaya

2.5.1. Pengertian Biaya

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan, biaya merupakan salah satu faktor yang paling memegang peranan adalah biaya, karena segala bentuk aktifitas yang akan dilaksanakan atas hasil dan pengambilan keputusan dapat berjalan dan mencapai hasil yang diharapkan tergantung daripada besarnya biaya yang tersedia. Untuk itu, perusahaan yang melakukan pengambilan keputusan dengan

mempertimbangkan masalah biaya dapat dikatakan pengambilan keputusan yang diambil adalah rasional, karena kekuatan biaya akan mendukung pengambilan keputusan tersebut.

Jika disimak beberapa pengertian para ahli ekonomi, umumnya memberikan defenisi tentang biaya adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan aktifitas usahanya dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sebagai umpan baliknya adalah keuntungan. Sehingga biaya disini tidak hanya difokuskan pada jangka pendek, tetapi juga jangka panjangnya.

Slamet sugiri (2001 : 134) memberikan defenisi bahwa " biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu".

Defenisi biaya yang dimaksudkan diatas mengandung dua pengertian, yaitu pengorbanan sumber ekonomis yang telah terjadi, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan atau dikorbankan pada masa lalu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian pengorbanan sumber ekonomi kemungkinan akan terjadi adalah nilai sumber ekonomi yang kemungkinan akan dikorbankan dengan memperhatikan kenaikan bunga yang terjadi pada masa akan datang.

Mardiasmo (200 : 176) mendefenisikan "Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi (dalam arti luas), sedangkan dalam arti yang sempit, biaya adalah satuan bagian pokok yang dikorbankan dalam usaha memperoleh penghasilan".

Berdasarkan pengertian diatas, biaya dalam arti luas adalah pengorbanan ekonomis yang dapat diukur dalam satuan uang dilakukan perusahaan untuk suatu tujuan. Sedangkan biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan ekonomis dari suatu bagian yang dapat diukur dalam satuan uang memperoleh penghasilan. Dengan demikian, baik pengorbanan ekonomis secara umum maupun pengorbanan ekonomis untuk bagian tertentu dengan maksud memperoleh hasil dikatakan sebagai biaya.

Sofian Safry Harahap (2002 : 76) mendefenisikan "biaya atau cost adalah jumlah yang diukur dalam bentuk keuangan dari kas yang dikeluarkan atau hutang yang dibentuk dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang diperoleh oleh suatu perusahaan".

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa biaya adalah suatu komponen dari kas yang dimiliki suatu perusahaan untuk dijadikan sebagai kekuatan ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa sehubungan aktifitas usahanya. Hal ini dapat dibenarkan, karena semua biaya dalam perusahaan didasarkan atas fungsi pokok kegiatan dan aktifitas perusahaan, biaya didasarkan atas periode akuntansi dimana biaya akan dibebankan dan biaya yang didasarkan atas tendensi perubahan terhadap aktifitas atau kegiatan atau volume.

2.5.2. Klasifikasi Biaya

Untuk mendapatkan informasi biaya yang bermanfaat pada berbagai tingkatan manajemen, akuntansi manajemen harus dapat mengklasifikasikan biaya sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Sofyan Syafrly harahap (2002 : 79) memberikan defenisi "klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan secara

sistematis atas keseluruhan elemen yang ada dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi yang lebih penting”.

Informasi dapat digunakan oleh manajemen untuk berbagai tujuan. Jika tujuan manajemen berbeda, maka diperlukan cara klasifikasi biaya yang berbeda pula. Jadi, tidak ada satu cara penggolongan biaya yang dapat memenuhi informasi untuk semua tujuan.

R.A supriyono (2000 : 18) mengklasifikasikan biaya dalam beberapa fungsi, yaitu :

1. Klasifikasi biaya sesuai fungsi kegiatan perusahaan.

Merupakan klasifikasi biaya kepada beberapa kegiatan yang ada dalam perusahaan, meliputi ;

- a. Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan fungsi produksi atau pengolahan bahan baku menjadi produk selesai mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
- b. Biaya pemasaran adalah biaya dalam rangka penjualan produk selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas, meliputi biaya penjualan, biaya pergudangan produk, pengepakan dan pengiriman, biaya periklanan.
- c. Biaya administrasi adalah biaya yang berfungsi dengan fungsi administrasi dan umum, meliputi gaji pimpinan tertinggi perusahaan, personalia, sekretariat, akuntansi, keamanan dan sebagainya.
- d. Biaya keuangan adalah semua biaya yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan, misalnya biaya bunga.

2. **klasifikasi biaya sesuai periode akuntansi** dimana biaya dibebankan merupakan **klasifikasi biaya yang berhubungan masalah biaya pengeluaran, yaitu :**
 - a. **Pengeluaran modal** adalah pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi.
 - b. **Pengeluaran penghasilan** adalah pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi dimana pengeluaran terjadi.
3. **Klasifikasi biaya sesuai tendensi perubahan terhadap aktifitas** merupakan **klasifikasi biaya yang dikaitkan dengan tujuan perencanaan dan pengendalian biaya serta pengambilan keputusan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :**
 - a. **Biaya tetap** yang jumlah totalnya tetap atau konstan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan tertentu.
 - b. **Biaya variabel** adalah biaya jumlah totalnya akan berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume kegiatan semakin tinggi jumlah total biaya variabel.
 - c. **Biaya semi variabel** biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding, semakin rendah biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding.
4. **Klasifikasi biaya sesuai obyek atau pusat biaya yang dibiayai** merupakan **klasifikasi biaya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan produk yang dihasilkan, departemen-departemen yang ada dalam pabrik, daerah pemasaran, bagian-bagian dalam organisasi yang lain bahkan individu yang dapat di bagi atas :**

- 4.1. Biaya langsung, yaitu biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu.
 - 4.2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.
5. Klasifikasi biaya untuk tujuan pengendalian merupakan klasifikasi biaya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan manajemen dan klasifikasi biaya ini terdiri atas :
- 5.1. Biaya terkendalkan, yaitu biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
 - 5.2. Biaya tidak terkendalkan, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pimpinan/ pejabat tertentu berdasarkan wewenang yang dimiliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat jangka waktu tertentu.
6. Klasifikasi biaya untuk tujuan pengambilan keputusan merupakan klasifikasi biaya yang dikaitkan atau dihubungkan dengan pengambilan keputusan yang dikelompokkan kedalam :
- 6.1. Biaya relevan, yaitu biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya ini harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
 - 6.2. Biaya tidak relevan, yaitu biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya ini tidak perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

2.6. Klasifikasi Biaya Sesuai Dengan Dapat Dikendalikan Tidaknya Oleh Manajer Dalam Hubungannya Pertanggungjawaban.

Pemisahan biaya kedalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban, karena tidak semua biaya yang terjadi dapat dikendalikan, sehingga hanya biaya terkendali yang menjadi tanggungjawab manajer.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, tiap manajer berpartisipasi dalam menyusun anggaran biaya bagian masing-masing dan pertanggungjawaban mengenai realisasi anggaran tersebut. Biaya dalam hubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Biaya terkendali (*controllable cost*)

Biaya terkendali adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu tempat biaya dan atas pengeluaran biaya tersebut seorang harus mempertanggungjawabkan. Sebagai contoh adalah biaya iklan merupakan tanggungjawab bagian penjualan atau manajer penjualan, karena biaya iklan adalah biaya terkendali.

b. Biaya tak terkendali (*Uncontrollable cost*)

Biaya tak terkendali merupakan biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh manajer suatu pertanggungjawaban. Untuk memisahkan biaya kedalam biaya terkendali dan biaya tak terkendali sangat sulit dilakukan. Namun sebagian pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggungjawab seseorang (pusat pertanggungjawaban), yaitu :

- Apabila seseorang memiliki wewenang dengan baik dalam perolehan maupun penggunaan jasa dan dia dibebani biaya jasa tersebut.
- Apabila seseorang secara berarti mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, dia dapat dibebani dengan biaya tersebut.

Meskipun seseorang tidak dapat secara berarti mempengaruhi jumlah biaya tertentu melakukan tindakannya, dia dapat dibebani biaya tersebut jika manajemen menghendaki agar supaya dia menaruh perhatian, sehingga dia dapat membantu orang-orang yang bertanggungjawab mempengaruhinya.

Semua biaya yang dikendalikan oleh manajer yang membawahnya terdapat dua cara untuk mengubah biaya tak terkendali menjadi biaya terkendali, yaitu :

- a. Mengubah dasar pembebanan dari alokasi pembebanan langsung.
- b. Dengan mengubah letak tanggungjawab pengambilan keputusan.

Untuk mengubah biaya tak terkendali menjadi biaya terkendali, maka biaya tersebut harus dibebankan sedemikian rupa kepada pusat pertanggungjawaban tertentu sehingga biaya tersebut dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan.

Pengubahan biaya tak terkendali menjadi biaya terkendali dapat pula dilakukan dengan cara mendelegasikan wewenang keputusan kepada menejer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Dengan demikian, manajer pusat pertanggungjawaban yang sebelumnya tidak mempunyai wewenang untuk

mempengaruhi biaya tertentu dengan diterimanya wewenang dari manajemen puncak dalam posisi dapat memperoleh biaya tersebut secara signifikan.

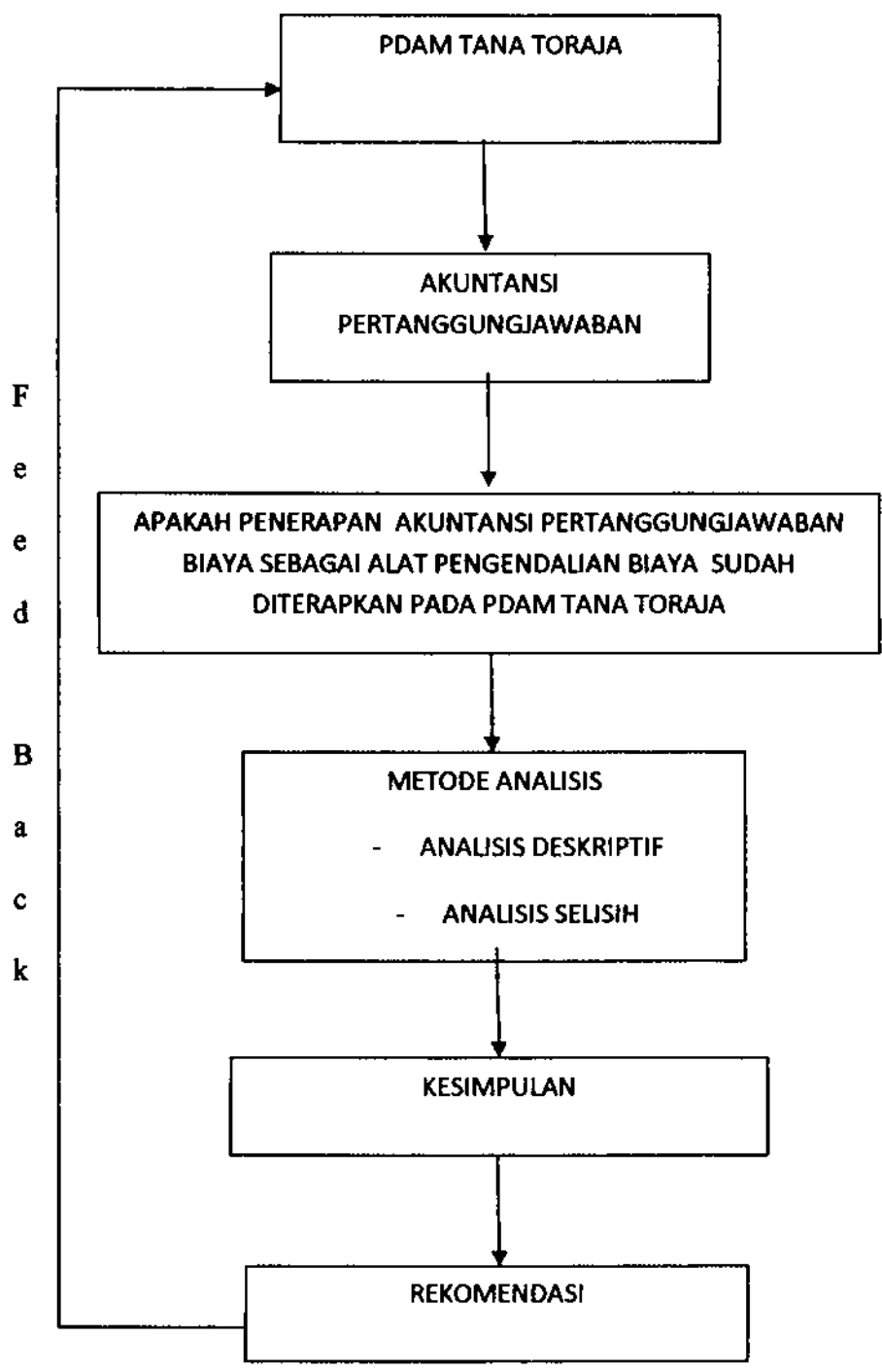
2.7. Selisih biaya

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja masalah yang sering dihadapi yaitu sering adanya selisih biaya yang dianggarkan dengan biaya yang sesungguhnya, maka dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan metode analisis selisih biaya yaitu analisis untuk mengetahui selisih antara biaya yang distandarkan dengan biaya yang sesungguhnya. Untuk mengetahui selisih biaya kita dapat mengetahuinya dengan cara mengurangi antara anggaran biaya dikurangi realisasi biaya maka akan didapatkan selisih yang terjadi baik selisih yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan.

2.8. Hipotesis

Dari permasalahan pokok diatas dapat diambil kesimpulan bahwa "diduga bahwa akuntansi pertanggungjawaban biaya sebagai alat pengendalian biaya belum diterapkan secara sepenuhnya".

2.9. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Objek yang dijadikan penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja, di Kabupaten Tana Toraja.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), terdiri dari ;
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati aktifitas PDAM Tana Toraja
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan beberapa karyawan yang dianggap kompeten tentang penggunaan anggaran biaya.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data melalui penelaan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan akuntansi pertanggungjawaban

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini terdiri dari ;

- a. Data kuantitatif adalah data yang bersifat keterangan atau informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, seperti data sistem anggaran, sistem penyusunan anggaran dan sistem pelaporan anggaran.

b. Data kuantitatif adalah data yang bersifat angka-angka, seperti data besarnya penggunaan anggaran dan laporan keuangan.

Sumber penelitian ini terdiri dari :

- Data primer merupakan data langsung yang bersumber dari data penelitian kepustakaan, seperti tentang penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- Data sekunder merupakan data tidak langsung bersumber dari wawancara dan hasil telaah dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisis deskriptif, yaitu analisis untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan PDAM Tana Toraja.
- b. Analisis selisih biaya, yaitu analisis untuk mengetahui selisih antara anggaran sesungguhnya dengan anggaran yang distandarkan.

3.5. Defenisi Operasional

- a. Akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan dan kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dan kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dengan memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

- b. Akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan serta penghasilan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban terhadap penyimpanan dan biaya dan penghasilan yang dianggarkan.
- c. Anggaran merupakan kompas yang menunjukkan arah yang harus dianut oleh pemerintah di dalam menjalankan administrasi keuangan dan sekaligus merupakan roda yang dapat mengemudikan arah itu.
- d. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja terbentuk beberapa tahap. Tahap I, yaitu tahun 1983 didirikan instalasi terdiri dari IKK, Kaero, Salu Allu, Rante Alang, dan IKKS Ge'tengan meliputi Daerah Randanan makale dengan kapasitas air 50 liter / detik.

Tahap II pada tahun 1985 berdasarkan peraturan daerah Tk. II Tana Toraja No. 3 Tahun 1985 tanggal 30 maret tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja dan pelaksanaan SK peraturan Daerah TK. II Tana Toraja No. 21/D/P/1976. Sesean

Pada tahun 1989 diadakan perubahan kapasitas produksi 500 liter/detik melalui cabang II Rantepao termasuk perluasan jaringan, yang meliputi IKKS Sanggalla' terdiri dari Daerah Ba'tan, La'bo', Madandan, Salu dan Nanggala.

Kemudian tahun 1990 mengadakan penambahan instansi III IKK Sesean dengan kapasitas produksi 20 liter / detik pada tahun 1992 IKKS Sesean dengan kapasitas 25 liter / detik PDAM melalui proyek pengembangan sistem penyediaan air bersih diupayakan penambahan detik air sebesar 500 liter / detik diinstalasi Rembon. Yang meliputi Uluvalu, Tallu lembang yang beroperasinya mulai tahun 1995. Sehingga jumlah keseluruhan kapasitas produksi PDAM Tk II Tana Toraja menjadi 1070 liter / detik.

Pada tahun 1994 atas bantuan proyek Pspab Sulawesi Selatan PDAM mendapat instansi penjernihan air (IPA) dengan kapasitas 200 liter / detik, sehingga keseluruhan kapasitas produksi PDAM menjadi 1290 liter / detik dan pada tahun 1997 diadakan uji coba pengoperasian IPA pandang – pandang kapasitas produksi yang dimanfaatkan adalah 50 liter / detik.

4.2. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

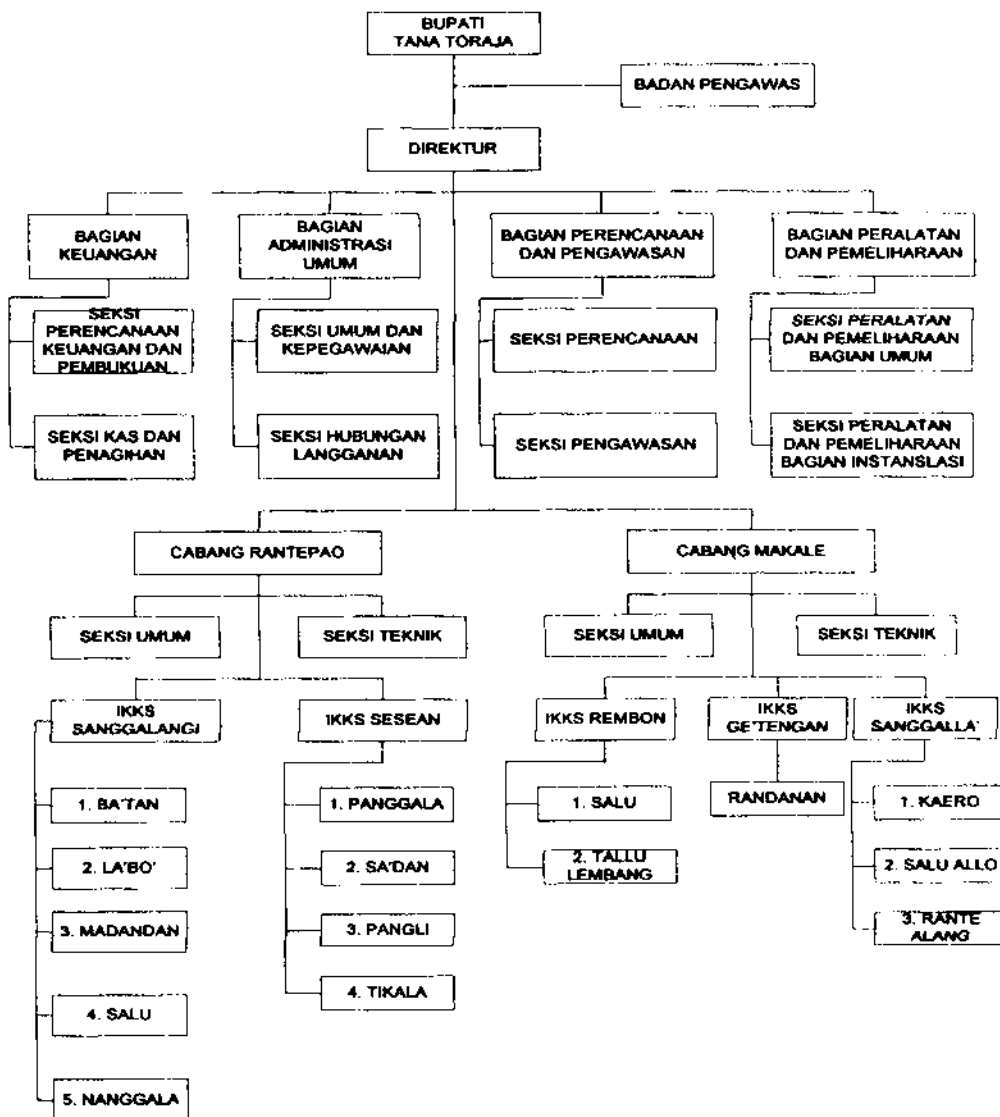
Dalam mendukung kelancaran aktifitasnya, PDAM Tana Toraja membuat susunan atau struktur organisasi yang bertujuan memberikan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing personil, sehingga setiap personil mengetahui pekerjaan dan jabatan yang diembannya.

struktur organisasi yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja adalah sistem garis, yaitu manajer Direktur selaku pihak tertinggi perusahaan secara langsung mendelegasikan tugas dan pekerjaan ke masing-masing bagian. Sebaliknya bagian-bagian melaporkan hasil pekerjaan masalah lain kepada manajer direktur.

Struktur organisasi Perusahaan Dalam Air Minum (PDAM) Tana Toraja dapat dilihat pada gambar halaman berikut ini :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PDAM

KABUPATEN TANA TORAJA



Sumber :PDAM Tana Toraja 2009

Berdasarkan struktur organisasi, maka uraian tugas Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 46/1/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja sebagai berikut :

1. Direktur

Mempunyai tugas :

- a. . Menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas menurut bidang masing-masing untuk masa 12 bulan dan sesuai tahun buku perusahaan daerah.
- b. Memberi pendapat dan saran kepada daerah tentang anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang diajukan direksi.
- c. Memelihara suasana kerja dalam seluruh organisasi dan berusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik.
- d. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi perusahaan daerah.

2. Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas:

- a. umum, keuangan, kepegawaian, dan sekretariat.
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan serta perlengkapan.

30

Bagian administrasi umum membawahi :

- a. Umum dan kepegawaian
- b. Seksi hubungan langganan

3. Bagian keuangan

Mempunyai tugas :

- a. Membuat evaluasi dalam kegiatan perusahaan di bidang tugasnya.
- b. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan setiap hari.

Bagian keuangan membawahi

- a. Seksi perencanaan keuangan dan pembukuan
- b. Seksi kas dan penagihan

4. Bagian Perencanaan dan Pengawasan

Mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian teknik dan bahan-bahan kimia.
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai peningkatan hasil produksi.

Bagian perencanaan dan pengawasan membawahi :

- a. Seksi perencanaan
- b. Seksi pengawasan

5. Bagian Peralatan dan pemeliharaan

Mempunyai tugas :

- a. Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan bagian tugasnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direksi.

Bagian peralatan dan pemeliharaan membawahi :

- a. Seksi peralatan dan pemeliharaan bangunan bagian umum.
- b. Seksi peralatan dan pemeliharaan bangunan instalasi.

6. Bagian Hubungan Langgan

Mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi pelayanan pelanggan, seksi pengadaan dan seksi pencatatan.
- b. Mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan dan calon pelanggan.
- c. Menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan serta pengolahan data pelanggan.

Bagian hubungan pelanggan membawahi :

- a. Seksi pelayanan pelanggan, mempunyai tugas mencatat setiap permohonan, sambungan baru dan penyelenggaraan administrasi pelanggan, memproses, mencatat dan melaporkan data pelanggan serta melayani dan mencatat setiap pelayanan pada terminal air hidran umum.

- b. Seksi pengaduan, mempunyai tugas invetrasiri segala jenis pengaduan yang masuk, meneliti kebenaran pengaduan, menyampaikan dan menguji penyelesaian pengaduan , memberitahukan pelanggan yang melanggar.
- c. Seksi pencatatan moneter, mempunyai tugas menyusun jadwal dan rencana pencatatan meteran per wilayah menurut jumlah petugas, melaporkan semua keadaan kebocoran yang ditemukan serta mengadakan penelitian dan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran pembacaan meter.

7. Bagian Personalia

Mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi administrasi dan pembinaan pegawai.
- b. Mengurus segala hal yang berhubungan dengan kepegawaian baik terhadap pegawai negeri sipil yang ditugaskan maupun pegawai perusahaan.
- c. Melaksanakan administrasi, kepegawaian, kesejahteraan pegawai dalam hal pengangkatan/pemberhentian/promosi pendidikan termasuk arsip kepegawaian.
- d. Menyelenggarakan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengaturan perjalanan dinas untuk kegiatan perusahaan.

- e. Mengkoordinir kegiatan pengetikan surat-surat dan naskah kepegawaian sesuai dengan ketentuan.

Bagian personalia membawahi :

- a. Seksi administrasi pembinaan pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan pembinaan pegawai mencakup pemberhentian, mutasi, pengangkatan termasuk arsip pegawai, mempersiapkan dan menyusun syarat-syarat calon pegawai yang dibutuhkan, menyelenggarakan seleksi calon pegawai serta mempersiapkan surat panggilan bagi calon pegawai yang memenuhi syarat.
- b. Seksi kesejahteraan pegawai mempunyai tugas menyusun struktur penggolongan gaji, menyusun dan memeriksa daftar gaji dan tunjangan serta pajak pendapatan pegawai baik perorangan maupun atas nama perusahaan.

8. Bagian keuangan

Mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi perencanaan keuangan dan seksi pembukuan.
- b. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang pelanggan serta menggali sumber-sumber keuangan untuk menambah dana perusahaan.
- c. Mengkoordinir kegiatan yang menyangkut masalah keuangan.

- d. Membuat evaluasi dalam kegiatan perusahaan di bidang keuangan.

Bagian keuangan membawahi :

- a. Seksi perencanaan keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran perusahaan berdasarkan daftar usulan anggaran secara sistematis, mencatat realisasi anggaran menurut mata anggaran, membuat laporan secara mengenai realisasi anggaran dan perubahan anggaran serta mengadakan pemeriksaan dan analisa penerimaan dan pengeluaran kas.
- b. Seksi pembukuan, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dari pembukuan umum serta mengadakan penelitian laboratorium kualitas air bersih di instalasi.

9. Bagian Distribusi

Mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi-seksinya.
- b. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pengaturan suplai air, memasang jaringan pipa distribusi dan alat bantu dalam rangka pembagian secara merata.
- c. Mengadakan pemeriksaan dan menanggulangi gangguan yang terjadi terhadap pelayanan dan langganan.

Bagian Distribusi membawahi :

- a. Seksi pengendalian suplai air bersih mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan serta pengembangan jaringan pipa

- distribusi, melakukan inventaris dan jaringan pipa distribusi dan kelengkapan serta mengadakan peraturan pendistribusian air bersih secara baik pada areal pelayanan.
- b. Seksi pemeliharaan dan pelayanan gangguan, mempunyai tugas mengatur sistem operasi pemeliharaan terhadap jaringan pipa distribusi, melakukan usaha pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan gangguan kelancaran air serta membuat dan menyusun rapat kerja serta mengatur jadwal penugasan untuk memperlancar pelayanan keluhan dan gangguan.
 - c. Seksi pemasangan instalasi langganan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, penelitian dan pemeriksaan terhadap kondisi pipa jaringan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemasangan, penggantian dan pencabutan meteran, mengadakan pengawasan dan pemeriksaan kondisi meter air dan melaksanakan kegiatan pemasangan instalasi langganan baru.

10. Bagian Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi-seksinya.
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi perusahaan.
- c. Melakukan penelitian terhadap rencana pembangunan daerah dalam rangka mengikut sertakan sarana perusahaan.

Bagian Penelitian dan pengembangan membawahi :

- a. Seksi Evaluasi Data dan Pelaporan, mempunyai tugas mengumpulkan, mengevaluasi dan menguji data yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, menghimpun hasil peraturan yang berhubungan kegiatan air minum serta mengevaluasi pelaksanaan sistem ium serta mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi antara bagian.
- b. Seksi pengembangan, mempunyai tugas melakukan survei pada instalasi, memberikan saran tentang langkah-langkah strategis kepada Direktur serta melakukan penelitian dan analisa kegiatan dalam upaya memperbaiki sistem yang telah ada.

11. Satuan Pengawasan Interen

Mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan seksi pemeriksaan bidang keuangan dan seksi pemeriksaan bidang operasional.
- b. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan administrasi dan teknik, sistem dan pengolahan keuangan serta kegiatan yang lain yang ada pada perusahaan.
- c. Mengadakan pengawasan ketertiban perusahaan terhadap penyelenggaraan tata kerja atau prosedur dan unit-unit kerja menurut ketentuan yang berlaku dan mengutamakan efesiensi dan mendahulukan sasaran pengawasan.

Satuan Pengawasan Intern membawahi :

- a. Seksi pemeriksaan bidang keuangan mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan keuangan dan pembukuan, memeriksa keuangan perusahaan, melaksanakan pemeriksaan keuangan dan pembukuan, melaksanakan pemeriksaan barang-barang milik perusahaan.
- b. Seksi pemeriksaan bidang operasional mempunyai tugas memeriksa operasional secara berkala serta mengevaluasi dan menganalisis semua kegiatan, program atau fungsi apakah berjalan sesuai kegiatan, program atau fungsi apakah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan.

4.3. Struktur Organisasi dan Sistem Anggaran PDAM Tana Toraja

Dalam melaksanakan atau menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, maka yang perlu diperhatikan adalah struktur organisasi yang memperlihatkan garis-garis wewenang dan batasan setiap tingkatan manajemen. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab masing-masing bagian dan bagaimana hasil dan melaporkan hasil kegiatan dalam organisasi. Oleh karena akuntansi pertanggungjawaban sasaran utamanya adalah pusat pertanggungjawaban, maka dengan adanya struktur organisasi yang mencerminkan pembagian tugas, berarti akuntansi pertanggungjawaban dengan mudah diterapkan khususnya akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja dengan melalui struktur organisasinya sangat jelas adanya pusat pertanggungjawaban, dimana bagian dan

seksi organisasi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan operasional. Masing-masing bagian mengetahui apa yang harus dilakukan dan kepada siapa dipertanggungjawabkan hasil kegiatannya.

Teori akuntansi pertanggungjawaban dijelaskan bahwa setiap pertanggungjawaban berpartisipasi dalam menyusun anggaran perusahaan, khususnya bagian yang dipimpinnya dan kemudian dalam pelaksanaannya setiap pusat pertanggungjawaban yang mempertanggungjawabkan semuanya yang mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang dilakukan berdasarkan atas perencanaan dan anggaran. Apabila teori tersebut dihubungkan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja telah memperlihatkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap bagian/seksi, maka hal ini memenuhi salah satu syarat untuk diterapkan akuntansi pertanggungjawaban dan sekaligus memberikan dasar yang baik bagi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pusat biaya.

Anggaran adalah rencana kegiatan mencakup pembagian kegiatan operasional yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam perusahaan. Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dan suatu tindakan yang dinyatakan dalam nilai uang serta pelaksanaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, maka anggaran harus ada setiap bagian untuk dijadikan sebagai pedoman kerja dan

merupakan alat kontrol bagi pemimpin untuk menilai prestasi yang dicapai berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Sistem anggaran Perusahaan Daerah (PDAM) Tana Toraja ditandai dengan masing-masing satuan unit kerja yang ada dalam PDAM Tana Toraja menyusun anggaran kerja tahunan dan melalui kepala bagian diteruskan kepada Direktur. Usulan anggaran kerja masing-masing unit kerja akan diteliti oleh Direktur dengan mengadakan penyesuaian anggaran yang tercantum dalam DIKDA (Daftar Isian kegiatan Daerah) dan DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah). Apabila usulan anggaran diterima, maka akan dibuatkan rencana biaya anggaran.

Masing-masing satuan unit yang ada dalam unit kerja PDAM Tana Toraja akan mempertanggungjawabkan semua penggunaan anggaran yang disetujui oleh masing-masing kepala Bagian dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, maka struktur organisasi dan sistem anggaran yang digunakan PDAM Tana Toraja memenuhi syarat dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, sebab masing-masing unit kerja sebagai pusat pertanggungjawaban, sebab masing-masing unit kerja sebagai pusat pertanggungjawaban berpartisipasi dalam menyusun pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada Bendahara yang akan membuat pertanggungjawaban secara keseluruhan anggaran.

4.5. Pengelompokan Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pendapatan dan pusat biaya akan dimintai pertanggungjawaban mengenai realisasi anggaran. Tidak semua biaya yang terjadi dapat dikendalikan, sehingga perlu adanya pembagian/pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, maka penilaian prestasi dapat dilakukan sebagai pusat biaya (cost Center)

Adapun penggolongan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Penggolongan Biaya Terkendali Dan Biaya Tidak Terkendali
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja
Periode 2008

Kelompok perkiraan biaya	Nama Perkiraan Biaya	Penggolongan Biaya
Biaya Produksi Langsung	a. Pemasangan sambungan baru b. Bahan baku c. Biaya perbaikan dan pemeliharaan	Terkendali Terkendali terkendali
Biaya Produksi tidak langsung	a. Pengembangan kapasitas produksi b. Biaya pengawasan lapangan	Tidak terkendali Tidak terkendali

	c. Biaya tenaga kerja lapangan	Tidak terkendali
Biaya administrasi dan umum	a. Peningkatan prasarana dan aparatur	Tidak terkendali
	b. Pendayagunaan sistem dan pelaksanaan	Tidak terkendali
	c. Sistem informasi	Tidak terkendali
	d. Diklat aparatur	Tidak terkendali
	e. Perjalanan dinas	Tidak terkendali
	f. Pembinaan dan penyuluhan hukum	Tidak terkendali

Sumber : PDAM Tana Toraja, Tahun 2009

Tabel diatas memperlihatkan bahwa, biaya dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu biaya produksi langsung yang merupakan biaya terkendali, biaya produksi tidak langsung serta biaya administrasi dan umum yang merupakan biaya tidak terkendali. Adanya penggolongan biaya yang akan membantu pelaksanaan pertanggungjawaban berlangsung dengan baik.

Sebagai ketentuan penggunaan anggaran ditetapkan nomor pengeluaran anggaran sebagai berikut :

a. Biaya produksi langsung

Nomor akun yang ditetapkan untuk biaya produksi langsung, yaitu :

- Biaya pemasangan sambungan baru dengan nomor mata anggaran 010011

- Biaya bahan baku dengan nomor mata anggaran 010012
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan dengan nomor mata anggaran 010013

b. Biaya produksi tidak langsung

Nomor akun yang ditetapkan untuk biaya produksi tidak langsung yaitu :

- Biaya pengembangan kapasitas produksi dengan nomor mata anggaran 010017
- Biaya pengawasan lapangan dengan nomor mata anggaran 010018
- Biaya tenaga kerja lapangan dengan nomor mata anggaran 010019

c. Biaya administrasi dan umum

Nomor akun yang ditetapkan untuk biaya administrasi dan umum yaitu :

- Biaya peningkatan prasarana dan aparatur dengan nomor mata anggaran 010020
- Biaya pendayagunaan sistem dan pelaksanaan dengan nomor mata anggaran 010021
- Biaya sistem informasi dengan nomor mata anggaran 010022
- Biaya diklat aparatur dengan nomor mata anggaran 010023
- Biaya perjalanan dinas dengan nomor mata anggaran 010024
- Biaya pembiayaan penulhan hukum dengan nomor mata anggaran 010025

Dengan adanya nomor mata anggaran akan memudahkan pencatatan anggaran dan sekaligus untuk membantu menganalisa sebab-sebab terjadinya penyimpangan seandainya hal tersebut terjadi. Selain itu akan membantu Bendahara dalam menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran yang akan dijadikan sebagai informasi terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan pertanggungjawaban , seperti Bupati.

Besarnya anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja selama Periode 2008 adalah sebesar RP.664.000.000 yang disusun berdasarkan jenis anggaran yang secara rinci akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.
Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja
Periode 2008

Jenis Anggaran Biaya	No. Mata Anggaran	Anggaran (Rp)
Biaya produksi langsung :		
a. Pemasangan sambungan baru	010011	64.000.000
b. Bahan baku	010012	89.000.000
c. Perbaikan dan pemeliharaan	010013	54.000.000
Total		207.000.000

Tabel diatas merupakan penggolongan anggaran biaya terkendali

Biaya Produksi Tidak Langsung :		
a. Pengembangan kapasitas produksi	010017	90.000.000
b. Biaya pengawasan lapangan	010018	40.000.000
c. Biaya tenaga kerja lapangan	010019	45.000.000
Biaya Administrasi Dan Umum		
a. Peningkatan prasarana	010020	55.000.000
b. Pendayagunaan sistem	010021	62.000.000
c. Sistem informasi	010022	35.000.000
d. Diklat aparatur	010023	60.000.000
e. Perjalanan dinas	010024	35.000.000
f. Pembinaan dan penyuluhan hukum	010025	35.000.000
Total		457.000.000

Tabel diatas merupakan penggolongan anggaran biaya tidak terkendali

Sumber : PDAM Tana Toraja 2009

Berdasarkan kedua tabel diatas memperlihatkan adanya pemisahan jenis anggaran biaya disertai dengan nomor mata anggaran, sehingga memudahkan untuk dilakukan analisa dan evaluasi seandainya terjadinya penyimpangan (selisih) terutama selisih yang tidak menguntungkan.

4.6. Penggunaan Anggaran PDAM Tana Toraja

Dalam melaksanakan anggaran , Bendahara akan mengajukan surat permintaan anggaran kepada Direktur dengan menyertakan surat keputusan otorisasi (SKO) dan surat permintaan pembayaran (SPP). Apabila surat permintaan mendapat

persetujuan, maka Direktur akan menerbitkan surat perintah membayar uang (SPMU) untuk diserahkan kepada Bendahara guna dilakukan pencairan anggaran.

Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran anggaran dengan menggunakan :

- a. Buku kas harian adalah buku yang difungsikan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran anggaran yang terjadi setiap hari dengan mencantumkan nomor, tanggal bulan dan tahun serta jenis pengeluaran.
- b. Buku kas pembantu adalah buku yang difungsikan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran anggaran dengan melakukan penjumlahan besarnya pengeluaran anggaran belanja guna sisa anggaran.
- c. Buku Kas Anggaran Belanja Rutin adalah buku yang digunakan atau difungsikan untuk mencatat transaksi pengeluaran anggaran yang didalam mencantumkan nomor rekening pengeluaran, keterangan, tanggal, nomor

Besarnya realisasi anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja selama periode 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Realisasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tana Toraja
Periode 2008

Jenis Anggaran Biaya	No. Mata Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)
Biaya produksi langsung :		
a. Pemasangan sambungan baru	010011	63.450.000
b. Bahan baku	010012	88.150.000
c. Perbaikan dan pemeliharaan	010013	53.125.000
Total		204.725.000

Tabel diatas merupakan realisasi anggaran biaya terkendali

Biaya Produksi Tidak Langsung :		
a. Pengembangan kapasitas produksi	010017	89.220.000
b. Biaya pengawasan lapangan	010018	39.000.000
c. Biaya tenaga kerja lapangan	010019	44.000.000
Biaya Administrasi Dan Umum		
a. Peningkatan prasarana	010020	53.000.000
b. Pendayagunaan sistem	010021	61.000.000
c. Sistem informasi	010022	34.250.000
d. Diklat aparatua	010023	57.350.000
e. Perjalanan dinas	010024	34.300.000
f. Pembinaan dan penyuluhan hukum	010025	34.200.000
Total		446.320.000

Tabel diatas merupakan realisasi anggaran biaya tidak terkendali
Sumber PDAM Tana Toraja 2009

Kedua tabel diatas memperlihatkan, bahwa realisasi anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja selama periode 2008 adalah sebesar Rp. 651.000.000

4.7. Akuntansi pertanggungjawaban Anggaran PDAM Tana Toraja

Akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan serta penghasilan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat menunjuk orang atau pihak yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya yang dianggarkan.

Adanya akuntansi pertanggungjawaban anggaran, berarti akan membantu pihak manajemen memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan mudah dianalisis dan dievaluasi agar dapat diperbaiki untuk masa akan datang.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja sebagai perusahaan Daerah yang menjadi pusat biaya atas penggunaan anggaran daerah, maka laporan akuntansi pertanggungjawaban sepenuhnya dibuat oleh Bendahara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran anggaran.
- b. Melakukan pemisahan anggaran menurut jenis mata anggaran.
- c. Menghitung saldo anggaran

Setelah bukti-bukti pengeluaran anggaran, pemisahan anggaran serta menghitung saldo anggaran, maka Bendahara mempersiapkan dokumen model bend 7, yaitu dokumen yang difungsikan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran yang isinya mencakup besarnya anggaran, nomor mata anggaran, realisasi anggaran serta selisih anggaran.

Laporan pertanggungjawaban anggaran kemudian diserahkan kepada bagian pengawas untuk dilakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian dengan DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) dan DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) guna memperoleh kebenarannya dan apabila sudah sesuai atau tidak ada kesalahan, maka dibuatkan surat pertanggungjawaban atau verifikasi (LSPJV) dan selanjutnya diserahkan ke Direktur untuk disahkan.

Maksud dan tujuan daripada laporan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi mengenai realisasi anggaran yang dikeluarkan dan sekaligus untuk mengukur prestasi yang dicapai manajemen dan laporan pertanggungjawaban dibuat setiap tahun dengan mencantumkan anggaran dan realisasi untuk diketahui selisih anggaran yang terjadi.

Adapun laporan pertanggungjawaban anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja selama periode 2008 adalah sebagai berikut

Tabel 4.
Laporan pertanggungjawaban anggaran
Perusahaan Daerah Air Minum Tana Toraja
Periode 2008

Jenis Anggaran Biaya	No. Mata Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
Biaya produksi langsung :				
d. Pemasangan sambungan baru	010011	64.000.000	63.450.000	550.000
e. Bahan baku	010012	89.000.000	88.150.000	850.000
f. Perbaikan dan pemeliharaan	010013	54.000.000	53.125.000	875.000
Biaya Produksi Tidak Langsung :				
a. Pengembangan kapasitas produksi	010017	90.000.000	89.220.000	780.000
b. Biaya pengawasan lapangan	010018	40.000.000	39.000.000	1.000.000
c. Biaya tenaga kerja lapangan	010019	45.000.000	44.000.000	1.000.000
Biaya Administrasi Dan Umum				
a. Peningkatan prasarana	010020	55.000.000	53.000.000	2.000.000
b. Pendayagunaan sistem	010021	62.000.000	61.000.000	1.000.000
c. Sistem informasi	010022	35.000.000	34.250.000	750.000
d. Diklat aparatur	010023	60.000.000	57.350.000	2.650.000
e. Perjalanan dinas	010024	35.000.000	34.300.000	700.000
f. Pembinaan dan penyuluhan hukum	010025	35.000.000	34.200.000	800.000
Total		664.000.000	651.000.000	13.000.000

Sumber PDAM Tana Toraja 2009

Berdasarkan tabel laporan pertanggungjawaban diatas terlihat adanya selisih anggaran yang menguntungkan disebabkan realisasi lebih kecil dari anggaran . terjadinya selisih anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Biaya Produksi Langsung

Dalam biaya pemasangan sambungan baru menunjukkan adanya selisih yang menguntungkan karena dalam biaya sambungan langsung menggunakan biaya yang

lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 64.000.000 realisasi Rp.63.450.000 dan selisih Rp.550.000. biaya bahan baku terjadi selisih yang menguntungkan disebabkan adanya penekanan biaya anggaran Rp.89.000.000 dan realisasi Rp.88.150.000 selisih Rp.850.000, biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin terjadi selisih anggaran yang menguntungkan karena biaya yang digunakan lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan Rp.54.000.000 realisasi Rp.53.125.000 selisih Rp.875.000.

Biaya Produksi Tidak Langsung

Biaya pengembangan kapasitas produksi terjadi selisih anggaran yang menguntungkan disebabkan karena biaya yang digunakan dapat dikontrol pemakaian dibagian produksi dapat dikontrol, biaya yang dianggarkan Rp.90.000.000 realisasi Rp.89.220.000 selisih Rp.780.000. biaya pengawasan lapangan terjadi selisih biaya yang menguntungkan karena biaya yang dianggarkan lebih besar dari realisasi biaya yaitu Rp.40.000.000 realisasi Rp.39.000.000 selisih Rp.1.000.000 Biaya tenaga kerja lapangan terjadi selisih yang menguntungkan dikarenakan realisasi anggaran lebih kecil dari anggaran yang distandarkan yaitu sebesar Rp.45.000.000 realisasi Rp.44.000.000 selisih Rp.1.000.000

Biaya Administrasi Dan Umum

Biaya peningkatan prasarana terjadi selisih anggaran yang menguntungkan ditandai dengan adanya biaya yang dianggarkan lebih besar dari realisasi yaitu Rp.55.000.000 realisasi Rp.53.000.000 selisih Rp.2.000.000. hal ini disebabkan adanya penekanan biaya peningkatan prasarana disebabkan pengeluaran disesuaikan

dengan tingkatan kebutuhan. Biaya pendayagunaan sistem aparatur terjadi selisih anggaran yang menguntungkan ditandai dengan adanya penekanan biaya yang yaitu biaya yang dianggarkan sebesar Rp.62.000.000 realisasi Rp.61.000.000 selisih Rp.1.000.000. sistem informasi terjadi selisih biaya yang menguntungkan hal ini disebabkan adanya penggunaan biaya lebih kecil dari biaya yang dianggarkan yaitu Rp.35.000.000 realisasi Rp.34.250.000 selisih Rp.750.000. Diklat aparatur terjadi selisih yang menguntungkan disebabkan realisasi biaya lebih kecil dari biaya yang sudah dianggarkan yaitu Rp.60.000.000 realisasi Rp.57.350.000 selisih Rp.2.650.000. perjalanan dinas terjadi selisih yang menguntungkan dikarenakan realisasi lebih kecil dari anggaran biaya yang sudah distandarkan yaitu Rp.35.000.000 realisasi Rp.34.300.000 selisih Rp. 700.000. Pembinaan dan penyuluhan hukum terjadi selisih yang menguntungkan disebabkan biaya yang dianggarkan lebih besar dari realisasi yaitu anggarannya sebesar Rp.35.000.000 realisasi Rp. 34.200.000 selisih Rp.800.000.

Hal ini sekaligus menjawab masalah pokok yang dikemukakan pada bab sebelumnya , bahwa akuntansi pertanggungjawaban biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja sebagai alat pengendalian biaya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi dan sistem anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja menunjukkan bahwa hubungan pertanggungjawaban disebabkan adanya pembagian tugas dan wewenang dan tanggungjawab yang dijadikan dasar dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban.
2. Penggolongan anggaran pendapatan dan biaya kedalam pendapatan usaha, pendapatan lain-lain serta biaya langsung usaha dan biaya administrasi dan umum sudah berjalan secara efektif, karena apabila terjadi penyimpangan akan dengan mudah diketahui.
3. Penggunaan anggaran berdasarkan surat permintaan anggaran, Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), sehingga pertanggungjawabannya dengan mudah dilakukan.
4. Akuntansi pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja sebagai pusat biaya (cost centre) sudah berjalan secara efektif dengan terjadinya selisih anggaran yang menguntungkan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya masing-masing bagian membuat pertanggungjawaban anggaran dengan membuat perincian biaya yang jelas.
2. Setiap penggunaan anggaran harus dibuatkan tersendiri pertanggungjawaban untuk memudahkan mengetahui apabila terjadinya penyimpangan dan solusi yang digunakan untuk memecahkannya.
3. Akuntansi pertanggungjawaban masing-masing bagian harus dilakukan guna mengetahui prestasi yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, 1991, *sistem akuntansi : penyusunan, prosedur dan metode*, Edisi kelima, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Djawarto, 1995, *Siklus Akuntansi*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan, syafry, 2002, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein, 1992, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2000, *Akuntansi dan Analisis Biaya*, Edisi Revisi, Bina Aksara, Jakarta.
- Marsono, 1997, *Republik Tata Usaha Perbendaharaan Indonesia*, Sapta Darma, Jakarta.
- Mas'ud, Mih , 1996, *Sistem Informasi Akuntansi Dan Organisasi Perusahaan*, Edisi Ketiga, Terjemahan Kosasi, Erlangga Jakarta.
- Mulyady, 1991, *Akuntansi Manajemen*, Edisi Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN, Yogyakarta.
- Munandar, 2001, *Budgetting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Madah, Yogyakarta.
- Smiyh, Jay, 1991, *Accounting Intermediate*, Terjemahan Erlangga, Edisi Kesembilan, Erlangga, Jakarta.
- Subagyo, 1992, *Pengelolaan Keuangan Negara*, Departemen Keuangan, Jakarta.
- Sugiri Slamet, 2001, *Akuntansi Suatu Pendekatan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bagian Penerbit AMP YKPN, Yogyakarta.
- Suriyono, 2000, *Akuntansi Manajemen : Proses Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syofian Syafri, 2007, *Teori akuntansi*, edisi revisi, bagian penerbit rajawali persada, Jakarta